

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**Pemberdayaan Balai Desa Melalui Literasi Buku Dalam Bentuk Perpustakaan
Desa Untuk Masyarakat Batu Putih Kenek**

OLEH:

Sama' (0703098603)

Framz Hardiansyah (0707079202)

STKIP PGRI SUMENEP

TAHUN 2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pemberdayaan Balai Desa Melalui Literasi Buku Dalam Bentuk Perpustakaan Desa Untuk Masyarakat Batu Putih Kenek

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Sama', M.Pd
Perguruan Tinggi : STKIP PGRI Sumenep
NIDN : 0703098603
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : PGSD
Nomor HP : 08578485646
e-mail : sultansamak@stkipgrisumenep.ac.id

Anggota

Nama Lengkap : Framz Hardiansyah, M. Pd
NIDN : 0707079202
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : PGSD
e-mail : framz@stkipgrisumenep.ac.id
Nama Mitra : Batu Putih Kenek
Tahun Pelaksanaan : 2020
Total Biaya : Rp. 7.000.000

Sumenep, 16 November 2020

Ketua Pengabdian,



SAMA', M. Pd
NIDN. 0703098603



Ketua Prodi PGSD,
Dr. M. RIDWAN, M.Pd
NIK. 07731100

Mengetahui,

Kepala LPPM STKIP PGRI Sumenep



MULYADI, M.Pd
NIK. 07731135

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan mata rantai terlemah jika sistem pemerintahan diibaratkan sebagai mata rantai dari mulai pusat, daerah dan desa/kelurahan (Hardiansyah et al., 2022). Padahal, Desa dan Kelurahanlah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawa ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama. Perpustakaan desa dan kelurahan adalah lembaga layanan publik yang berada di desa dan kelurahan. Sebuah unit yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat tersebut, bertujuan untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat (Hardiansyah et al., 2021). Secara umum, pada tataran legalitas formal, status dan program pengembangan perpustakaan secara umum di Indonesia sudah mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Hardiansyah & Wahdian, 2023). Begitu juga dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan, lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan, di mana aspek-aspek pengembangan perpustakaan dan kepastakawanan sudah dikaji dan diatur rapi secara terperinci dalam pasal-pasal perundang-undangan tersebut. Sebagai bentuk respon terhadap amanat undang-undang tersebut, Berbagai pihak terutama yang terkait langsung dengan bidang perpustakaan juga telah berusaha untuk mengimplementasikan keputusan tersebut melalui program perpustakaan di tingkat desa/kelurahan. Namun demikian secara operasional peran penting perpustakaan belum dapat diaktualisasikan secara optimal (Hardiansyah & AR, 2022). Kota Sumenep, menurut data hasil pembinaan kelurahan tahun 2022, masih ada beberapa perpustakaan kelurahan yang belum beroperasi secara optimal salah satunya yaitu di Desa Batu Putih Kenek.

Dalam penyelenggaraan perpustakaan banyak kendala-kendala yang muncul antara lain disebabkan kompetensi SDM yang belum memadai, masih rendahnya minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah koleksi dan yang paling dominan adalah masalah terbatasnya anggaran dalam pengembangan perpustakaan itu sendiri (AR et al., 2023). Walaupun perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai partner dalam mendukung tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi pada kenyataannya pengalokasian dana untuk pengembangan perpustakaan masih sangat memprihatinkan. Karena permasalahan ini sifatnya mendasar, hal ini tentu memiliki dampak langsung pada seluruh program pengembangan perpustakaan pada semua jenis dan tingkat, terutama pada tingkat perpustakaan desa/kelurahan. Dalam observasi yang dilakukan diidentifikasi beberapa permasalahan berkenaan dengan pemberdayaan balai desa dalam bentuk perpustakaan desa yaitu; terbatasnya anggaran untuk pengadaan koleksi perpustakaan; terbatasnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas; dan rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan (Hardiansyah, 2020). Perpustakaan Desa menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan, perpustakaan desa adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengembangan perpustakaan yang ada di wilayah desa/kelurahan dan melaksanakan layanan perpustakaan bagi masyarakat umum dengan tidak membedakan ras, usia, agama, gender dan status sosial ekonomi (Herdiana et al., 2019).

Adapun tujuan perpustakaan desa adalah untuk meningkatkan kualitas serta taraf hidup masyarakat melalui tersedianya bahan perpustakaan atau akses informasi guna meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan, pendidikan, apresiasi budaya, dan rekreasi bagi kepentingan pembelajaran yang dilakukan sepanjang hayat. Kehadiran perpustakaan desa pada dasarnya milik, dibangun oleh rakyat dan ditujukan untuk melayani masyarakat yang ada di desa tersebut (Herdiana et al., 2019). Perpustakaan desa punya peran yang penting bagi warga desa untuk dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Perpustakaan desa juga berperan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Dengan informasi yang dimiliki, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam usaha meningkatkan taraf hidupnya. Dengan mengetahui akan pentingnya meningkatkan pengetahuan, diharapkan budaya literasi dapat

mendukung masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat memperbaiki kesejahteraan mereka.

2. METODE

Metode yang digunakan yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA) yang mana metode PRA didefinisikan sebagai metode dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan menekankan kepada partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan proses yang sedang dilaksanakan mulai dari tahap awal berupa perencanaan kegiatan sampai dengan tahap akhir berupa evaluasi dan penerimaan manfaat bagi masyarakat (Ariyani et al., 2017). Data yang diperoleh dengan menggunakan metode PRA tidak akan persis sama antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, hal ini menjadi bukti akan beragamnya hasil informasi yang didapat dari masyarakat (Widayanto, 2020). Tahap persiapan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: Pertama, melakukan observasi mengenai kondisi literasi yang ada di Desa Batu Putih Laok, bagaimana minat dan budaya baca masyarakat serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kegiatan literasi perdesaan. Kedua, pemetaan masalah dan potensi dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Ketiga, melakukan penyusunan program kegiatan setelah memperoleh pemetaan dan potensi mengenai kegiatan literasi perdesaan. Dalam ketiga tahap tersebut mahasiswa melibatkan masyarakat agar terjadi proses komunikasi dua arah dan memunculkan kesepahaman dengan masyarakat. Berbagai kegiatan yang telah disusun dalam tahap persiapan mulai dilaksanakan dengan mengajak para aktor kepentingan untuk secara bersama-sama berpartisipasi menyelesaikan berbagai kegiatan yang telah disusun.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat desa/kelurahan adalah perpustakaan, oleh karena itu maka secara umum tujuan penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah; (a) Untuk menunjang program wajib belajar. (b) Menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup bagi masyarakat. (c) Menyediakan buku - buku pengetahuan maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan masyarakat di berbagai bidang, misalnya; Pertanian (yang produktif), Perikanan, peternakan, perindustrian, Pengolahan, pemasaran, Kewirausahaan, Buku anak-anak dan lain-lain. (d) Menggalakkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis, produktif dan mandiri. (e) Menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudayaan sebagai sumber informasi, penerangan, pembangunan dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan dan kelurahan. (f) Memberikan semangat dan hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu senggang dengan hal – hal yang bersifat membangun. (g) Mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.

Bila dilihat dari Pedoman Standar Nasional Perpustakaan, ketentuan maupun persyaratan dan ketentuan penyelenggaraan perpustakaan desa dan kelurahan adalah sebagai berikut; 1. Kerjasama perpustakaan, kegiatan pemanfaatan layanan perpustakaan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbasis koleksi perpustakaan dengan sistem tertentu. Untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan mengembangkan kerjasama dengan sesama perpustakaan di lingkungan instansi. 2. Koleksi perpustakaan, Koleksi perpustakaan meliputi semua informasi dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan; Jumlah koleksi sekurang-kurangnya meliputi: koleksi anak (500 judul); koleksi remaja/dewasa (1.000 judul); koleksi referensi anak (50 judul); koleksi referensi remaja/dewasa (50 judul); surat kabar yang dilanggan (1 judul); majalah yang dilanggan (1 judul); dan koleksi audio visual (1judul); Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah, Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat, Usia koleksi diharapkan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi keseluruhan,

Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan referensi. Koleksi bahan perpustakaan referensi sekurang-kurangnya terdiri dari ensiklopedia dan kamus, Bahan perpustakaan diseleksi dan diolah dengan sederhana.

Rencana Pengembangan Perpustakaan Desa dan Kelurahan

Dalam melakukan rencana pengembangan perpustakaan desa, diperlukan sebuah analisis dan strategi sebagai dasar pembuatan kebijakan yang akan diambil. Analisis SWOT, Analisis SWOT merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam melakukan analisis suatu kondisi. Teknik tersebut biasa digunakan dalam mengembangkan sebuah organisasi atau institusi. Ada empat pilar dalam analisis SWOT, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan hambatan (*threat*). Berikut ini adalah hasil analisis SWOT terkait dengan rencana pengembangan perpustakaan desa/kelurahan; 1) Kekuatan (*strength*); Lingkup masyarakat lebih kecil sehingga umumnya bersifat homogen dilihat dari pendidikan dan pekerjaan, Lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. 2) Kelemahan (*weakness*); Sumber daya manusia tidak memadai, baik dari segi jumlah tenaga pengelola maupun kompetensi kepustakawanan yang dimiliki, Anggaran yang tersedia jumlahnya sangat terbatas, Sebagian besar desa dan kelurahan belum memiliki gedung/ruangan khusus yang digunakan untuk perpustakaan termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang memadai, Koleksi yang ada masih sangat minim, Pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan masih seadanya. 3) Peluang (*opportunity*); Pilihan terhadap sumber informasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sangat terbatas, sehingga perpustakaan desa dan kelurahan bisa menjadi sumber informasi yang sangat penting bahkan mungkin satu-satunya, Potensi pemanfaatan perpustakaan oleh seluruh lapisan masyarakat sangat besar karena secara umum masyarakat desa dan kelurahan masih senang meminjam buku daripada membeli buku, Adanya aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan mengenai pembentukan organisasi perpustakaan desa/kelurahan yang dapat dibentuk dari organisasi kelembagaan di masyarakat yang belum banyak diterapkan oleh semua perpustakaan desa/kelurahan, Adanya bantuan dana 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa/kelurahan yang belum dimanfaatkan untuk perpustakaan desa/kelurahan, Adanya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh perpustakaan desa/kelurahan, Adanya jam CSR karyawan yang belum dimanfaatkan untuk tenaga perpustakaan desa dan kelurahan. 4) Hambatan (*threat*); Wilayah geografis Indonesia serta belum meratanya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat pedalaman membuat akses ke sebagian pedesaan cukup sulit. Hal ini menjadi salah satu sulitnya melakukan pembinaan bagi perpustakaan desa/kelurahan, Pola pikir masyarakat yang tradisional cenderung memilih pengetahuan yang didapat secara turun-temurun sebagai pedoman hidupnya. Umumnya masyarakat desa tidak lagi tergerak untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Strategi Pengembangan Kepustakawanan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pengelolaan perpustakaan mencakup 3 hal, yaitu pengembangan koleksi perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, dan pelestarian bahan perpustakaan. Dalam pengembangan koleksi bahan perpustakaan hal yang paling utama adalah keterpakaian bahan perpustakaan untuk dimanfaatkan pemustaka. Sebagaimana Ranganathan mencetuskan lima prinsip perpustakaan, yaitu; *Books are for use* (setiap buku harus digunakan), *Every reader his book* (Setiap pembaca harus ada bukunya), *Every books its reader* (setiap buku harus ada pembacanya), *Save the time of the reader* (menghemat waktu pemustaka), *Library is growing organism* (perpustakaan merupakan organisme yang bertumbuh).



Gambar 1. Proses Entry Data Buku

Untuk menyelenggarakan perpustakaan desa/kelurahan, diperlukan seorang pustakawan dan dua orang tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan dapat juga merangkap sebagai Kepala Perpustakaan yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan. Untuk itu, perlu adanya inisiatif dari Pemerintah Daerah dan Perpustakaan Nasional untuk bekerjasama dalam menyiapkan anggaran guna melaksanakan pelatihan kepustakawanan di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar mempercepat pertumbuhan jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan di seluruh Indonesia. Dengan kerjasama yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota maka diharapkan penyerapan tenaga perpustakaan desa/kelurahan dapat semakin besar. Pembangunan gedung/ruangan khusus perpustakaan serta sarana dan prasarana standar perpustakaan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini dapat juga diatasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat baik melalui penggalangan dana maupun tenaga dalam melakukan pembangunan gedung.



Gambar 2. Kegiatan Literasi bersama anak-anak desa Batu Putih Kenek

Selain mengandalkan APBD dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa/kelurahan juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN maupun swasta melalui dana bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun untuk dapat menjalin kerjasama perlu juga dilakukan pelatihan terkait dengan strategi untuk menjalin kerjasama tersebut. Jika belum memungkinkan untuk pembangunan gedung perpustakaan, dapat dimanfaatkan ruangan yang ada. Dengan adanya aplikasi inlislite versi 3, koleksi digital dapat dimaksimalkan melalui kerjasama dengan perpustakaan umum daerah yang juga bermitra dengan Perpustakaan Nasional RI dalam memanfaatkan aplikasi inlislite. Tampilan perpustakaan desa dan kelurahan minimal bisa dalam bentuk perpustakaan digital. Perpustakaan desa dan kelurahan hanya perlu sarana dan prasarana komputer serta jaringan untuk mengakses koleksi perpustakaan bagi pemustaka. Selain itu, bisa juga dalam bentuk mobil perpustakaan keliling kelurahan yang didapat dari dana DPWkel (Kota Cilegon) yang bersumber dari 5% APBD, karena sampai saat ini belum dimanfaatkan untuk perpustakaan desa dan kelurahan. Perpustakaan Desa dan Kelurahan selama ini menghadapi keterbatasan koleksi, karena keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pengadaan koleksi tersebut dapat dilakukan kerjasama pengembangan koleksi perpustakaan desa dan kelurahan dengan perpustakaan sekolah. Gerakan Karya Siswa untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan mungkin bisa dijadikan solusi keterbatasan koleksi yang ada di perpustakaan desa dan kelurahan. Para siswa dituntut untuk

menulis cerita rakyat menurut karangan dan imajinasinya sendiri sehingga cerita rakyat anak-anak sekarang dapat menjadi cerita rakyat yang bersejarah untuk puluhan tahun mendatang. Hal ini tentu saja tidak terbatas pada kerjasama dengan perpustakaan sekolah saja. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu untuk mengadakan materi menulis cerita rakyat. Di tingkat SD adalah pembelajaran Pintar Menulis, sehingga dapat disisipkan kegiatan menulis bagi seluruh siswa SD Kelas 6 untuk membuat cerita rakyat sebagai salah satu syarat kelulusan. Tentu tidak mudah untuk bekerjasama, namun tidak adalah salahnya untuk dicoba. Selain membantu memperkaya koleksi perpustakaan sekolah, karya siswa juga dapat memperkaya perpustakaan desa dan kelurahan di mana mereka berada.

Koleksi lainnya dalam bentuk digital juga dapat diperoleh melalui kerjasama dengan Perpustakaan yang telah mempunyai koleksi digital. Dengan program aplikasi Inlislite versi 3 dari Perpustakaan Nasional RI akan memudahkan perpustakaan yang bermitra dengan Perpustakaan Nasional RI untuk saling tukar-menukar koleksi. Selain itu pemberian bantuan koleksi bahan perpustakaan dapat dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Umum Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mendorong pemanfaatan bahan perpustakaan dengan melakukan workshop/seminar tentang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pekerjaan utama di wilayah perpustakaan desa dan kelurahan. Salah satu upaya mempromosikan perpustakaan adalah dengan mengadakan seminar atau workshop dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pekerjaan mereka. Sebagai contoh, di wilayah desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, perpustakaan dapat membuat workshop dengan menggunakan koleksi perpustakaan desa yang adalah sebagai sumber referensinya. Dengan cara demikian, masyarakat akan menilai bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka dapat memanfaatkan buku koleksi yang adalah di perpustakaan. Setelah kesadaran itu timbul, maka dengan sendirinya kesadaran akan pentingnya informasi dengan membaca akan meningkat sehingga membaca menjadi sebuah kebutuhan.

4. KESIMPULAN

Perpustakaan desa/kelurahan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Perpustakaan Nasional RI menjadikan masyarakat Indonesia gemar membaca. Penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan tidak dapat dikesampingkan, dan bisa jadi ujung tombak pembangunan gerakan masyarakat Indonesia Membaca. Masyarakat Desa/Kelurahan masih terus mengembangkan swadaya masyarakat di berbagai bidang. Hal itu didukung dengan dana stimulan 1 Milyar 1 Kelurahan dengan besaran 5% APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut selain untuk membangun infrastruktur fisik, bisa dimanfaatkan pula dengan pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan. Tentu saja, tugas pustakawan dalam hal ini hendaknya bisa memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyampaikan kepada pimpinan akan solusi pengembangan perpustakaan desa/kelurahan melalui alokasi dana kelurahan tersebut. Selain itu, masalah tenaga perpustakaan desa/kelurahan yang belum adalah atau masih kurang, dapat dibentuk dari tokoh masyarakat yaitu RT/RW atau Tim Penggerak PKK.

Apabila di dalam alokasi anggaran desa/kelurahan sebesar 5% APBD Kabupaten/ Kota tersebut sudah direncanakan sebuah kegiatan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan, dapat diusulkan di dalamnya mengenai pembentukan pengelola perpustakaan desa/kelurahan berikut honorarium pelaksanaan kegiatannya. Selain dana dari APBD, pustakawan juga dapat mendampingi kelurahan untuk berupaya berkolaborasi dengan pihak lain seperti BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, tokoh masyarakat agar dapat mendukung pengembangan perpustakaan di desa/kelurahan. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan desa. Namun, tanpa komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan pihak yang mempunyai dana CSR tersebut, pengembangan perpustakaan desa/kelurahan akan menjadi absurd.

DAFTAR PUSTAKA

AR, M. M., Hardiansyah, F., Aini, K., Armadi, A., & Astutik, C. (2023). pelatihan game edukasi berbasis sdgs dalam upaya membentuk karakter melalui penguatan proyek profil pelajar

pancasila bagi guru mi ziyadatul ulum desa kambing barat. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 416–424.

- Ariyani, L. P. S., Mudana, W., Atmadja, N. ., & Purnawati, D. M. . (2017). Pemberdayaan Pemuda dalam Pengembangan Perpustakaan Desa Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Masyarakat. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2017*, 449–455. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_449186655088.pdf
- Hardiansyah, F. (2020). Implementasi nilai religius melalui budaya sekolah: Studi fenomenologi. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 4(1), 15–24.
- Hardiansyah, F., & AR, M. M. (2022). Enhancing Students' Learning Motivation through Changing Seats in Primary School. *Mimbar Sekolah Dasar*, 9(1), 253–268. <https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v9i1.43002>
- Hardiansyah, F., Budiyo, F., & Wahdian, A. (2021). Penerapan Nilai-nilai Ketuhanan Melalui Pembiasaan di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6318–6329.
- Hardiansyah, F., Misbahudholam AR, M., & ' S. (2022). Pelatihan Membuat dan Menggunakan Alat Peraga Game Eleven Pieces Multiplication (GEPION) untuk Memudahkan Menghitung Perkalian pada Guru di Sekolah Dasar. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 162. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i2.984>
- Hardiansyah, F., & Wahdian, A. (2023). Improving Science Learning Outcomes Through the Development of the Magic Card Box Learning Media. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(1), 823–833.
- Herdiana, D., Heriyana, R., & Suhaerawan, R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Literasi Perdesaan di Desa Cimanggu Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(4), 431–442. <https://doi.org/10.30653/002.201944.208>
- Widayanto, M. T. (2020). Optimalisasi Perpustakaan Desa Untuk Meningkatkan. *Jurnal Pengabdian Barelang*, 2(1), 32–39.